



RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2023

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563

KATA PENGANTAR

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenan-Nya semata sehingga kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang merupakan ikhtisar rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pedoman dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 ini dapat disusun berkat kerjasama semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 ini. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat disusun. Namun kami menyadari dalam penyusunan dan penyajian Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan RKT di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat dijadikan tolok ukur serta acuan bagi kita semua terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023. Semoga semua langkah dan upaya kita selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 6 Januari 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Ketua



Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TINGKAT KEMENTERIAN /LEMBAGA TAHUN 2023

INSTANSI : PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100% 100% 100% 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel - Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Umum - Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara banding, kasasi, PK dan Grasi	486 perkara	240.600.000
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	95% 100% 100% 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	85% 90% 90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		d. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel - Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Umum - Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara banding, kasasi, PK dan Grasi - Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi 	486 perkara	240.600.000
		- Perdata	90%					
		- Pidana	90%					
		- PHI	90%					
- Tipikor	90%							
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	50%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum (terhadap permohonan pembebasan biaya perkara)	3 Perkara	2.760.000

		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara di lingkungan Peradilan Umum yang diperiksa melalui layanan sidang di luar gedung pengadilan (terhadap permohonan perkara yang diperiksa melalui sidang keliling)	10 Perkara	4.500.000
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatk layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum (terhadap permohonan bantuan hukum)	480 orang / jam layanan	48.000.000
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	5%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan (Eksekusi putusan pengadilan)	10 Perkara	2.960.000

Yogyakarta, 6 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta



Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum